

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

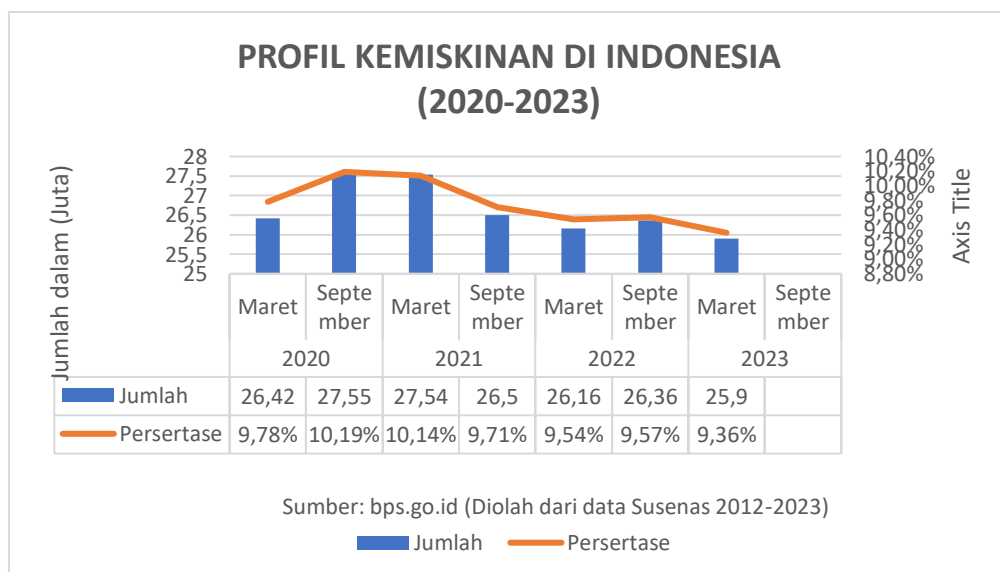
Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada awal tahun 2020, telah banyak memukul berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Selain dari adanya krisis kesehatan akibat adanya pandemi, masyarakat sangat tertekan dan dibayang-bayangi krisis sosial dan ekonomi akibat tidak bisa beraktivitas seperti biasa untuk pergi bekerja, akibat dari berbagai kebijakan pemerintah dalam proses pencegahan penyebaran virus. Kebijakan-kebijakan seperti PSBB, PPKM, *Stay at home*, *Work From Home* (WFH) dan *Social Dictancing* sangat menekan industri ritel dan jasa yang mengakibatkan turunnya tingkat pendapatan masyarakat.

Masifnya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepanjang tahun 2020 hingga 2021 sebagai bentuk efisiensi perusahaan, bertambahnya angkatan kerja yang menyebabkan, serta kemajuan teknologi yang semakin pesat. Sehingga semakin mempersulit keadaan dan dapat mengakibatkan resiko ekonomi yang besar bagi masyarakat, dimana hal ini dapat memiliki akibat pada meningkatnya tingkat pengangguran dan resiko naiknya kemiskinan di Indonesia.

Maka dari itu pemerintah dalam beberapa tahun menerapkan sangat banyak membuat program-program bantuan sosial dan subsidi, dalam upaya melindungi masyarakat miskin serta menyelamatkan ekonomi nasional. Program-program yang berjalan sejak 2020 seperti BST (Bantuan Sosial

Tunai), BLT (Bantuan Langsung Tunai), bantuan sembako, subsidi listrik, program keluarga harapan, kartu pra kerja, kartu Indonesia pintar, dll (Apriyani, 2020). Banyaknya program yang telah dilaksanakan, pemerintah terlihat sangat ingin memaksimalkan anggaran yang sangat besar pada masa awal pandemi guna mencegah keruntuhan ekonomi Indonesia, meskipun dalam proses implementasi kebijakan-kebijakan tersebut tak luput dari banyak pro dan kontra dimasyarakat.

Menurut BPS antara bulan Februari s/d Agustus 2020, penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 adalah 29,12 juta orang atau 14,28% dari 203,97 juta penduduk usia kerja Indonesia. Dengan 24,03 juta orang dengan bekerja dengan pengurangan jam kerja, 2,56 juta pengangguran baru, 1,77 juta di rumahkan, dan 0,76 juta orang yang bukan angkatan kerja. Dari besarnya persentase tersebut menyebabkan tingginya peluang bagi meningkatnya jumlah masyarakat miskin secara nasional.



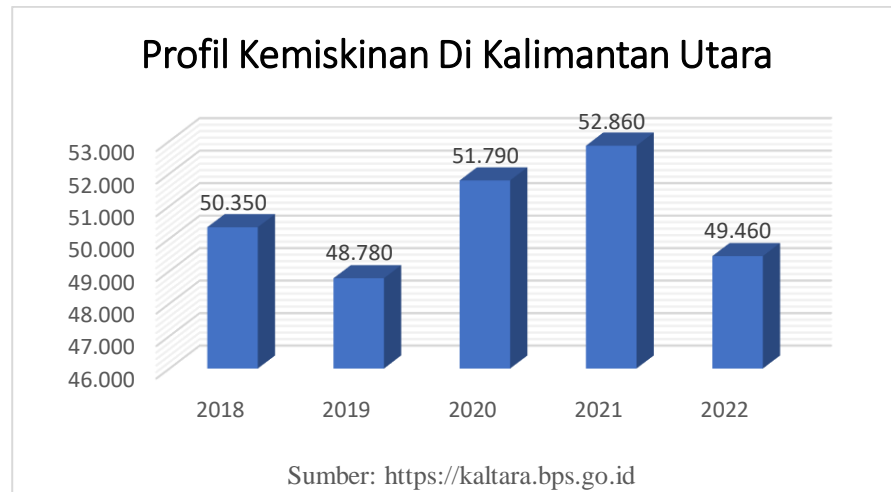
Tabel 1. 1 Profil Kemiskinan Di Indonesia (2020-2023)

Dari table 1.1 dapat diketahui bahwa, secara nasional sepanjang tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2021 memang terjadi peningkatan jumlah masyarakat miskin akibat dari penurunan aktivitas ekonomi yang dialami Indonesia, kemudian diakhir tahun 2021 hingga *quarter* pertama tahun 2022 perekonomian Indonesia bertahap mulai kembali normal, sembari berbagai program jaminan sosial tetap berjalan.

Namun data ini merupakan himpunan data Nasional, yang belum tentu mencerminkan suatu kondisi ekonomi riil Indonesia, mengingat ketimpangan jumlah penduduk, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Manusia antara Jawa dan luar Jawa. Sektor bisnis yang berkembang dan sumber daya tiap-tiap daerah, maka keadaan ekonomi Masyarakat dimasing masing wilayah juga akan berbeda-beda. Daerah-daerah yang masyarakatnya bergantung pada hasil alam seperti pertanian, perkebunan (sawit, karet, dll) serta sektor tambangan, bisa jadi dampak yang dirasakan masyarakatnya akan berbeda dari daerah yang masyarakatnya lebih bergerak pada sektor jasa dan retail.

Misalnya Kalimantan Utara, daerah ini baru mengalami pemekaran dengan menjadi provinsi ke tiga puluh tiga di Indonesia, provinsi ini sangat mengandalkan komoditas hasil alam dalam menjalankan roda perekonomian di daerahnya. Sepanjang tahun 2020 kinerja ekonomi Kaltara sempat jatuh pada titik terendah pada Quarter 4 dengan -4,76%, namun berangsur membaik di tahun 2021 hingga dapat pulih kembali pada Quarter ke 2 di level 5,81% (*Databoks*, 2021). Pulihnya perekonomian Kalimantan utara didukung dengan pulihnya permintaan produk hasil alam sebagai produk

unggulan dari provinsi ini. Peningkatan produksi pada sektor industri kayu, industri hasil laut (rumput laut, ikan, udang, dll), pertambangan, serta industri CPO (*crude palm oil*) sebagai hasil produk kelapa sawit (diskominfo.kaltaraprov.go.id).



Tabel 1. 2 Profil kemiskinan Di Kalimantan Utara (2018-2022)

Program Jaminan Sosial yang cukup panjang dalam yang masih berjalan adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), program BLT-DD tahun 2022 dialokasikan khusus dengan jumlah minimal 40% dari dana desa, sebagaimana diatur dalam Perpres No.104 tahun 2021(bungko.desa.id). Dengan garis kemiskinan Kalimantan Utara yang sebesar Rp 730.000 ditahun 2021, kemudian menjadi Rp 772.000 pada maret 2022, bantuan yang diterima oleh masyarakat kurang mampu dikaltara pasti akan sangat mendukung para penerima keluar dari garis kemiskinan tersebut. Namun selama program tersebut berjalan hingga akan berakhir pada tahun 2022, masih banyak yang berpendapat jika data yang digunakan selama program ini kurang akurat dan

tidak tepat sasaran, selain itu program ini membebani anggaran desa dan membatasi alokasi anggaran terhadap program lain yang ada di desa.

Pada masa awal pandemi Covid, isu tentang data penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran menjadi topik yang banyak menjadi sorotan, meskipun seiring dengan waktu kementerian sosial berusaha memperbarui data yang ada untuk berbagai program yang sedang berjalan. Dengan anggaran sebesar Rp 93.665.034.000 (Sembilan puluh tiga milyar enam ratus enampuluh lima juta tiga puluh empat ribu rupiah) untuk Kabupaten Bulungan di 2021, maka isu terkait penyaluran dan manfaat menjadi topik yang cukup sensitif.

Proses pemilihan masyarakat penerima manfaat di Desa Karang Agung ditetapkan melalui proses musyawarah desa, Dengan tantangan tantangan ekonomi yang semakin kencang panca pandemi, dan upaya pemulihan ekonomi yang masih berjalan, sangat penting bagi pemerintah untuk memperhatikan dengan serius masyarakat yang rentang miskin. Maka, program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan sangat membantu keuangan masyarakat, kemudian bagaimana pemerintah desa karang agung dalam memaksimalkan program BLT-DD tersebut agar mencapai hasil yang diharapkan bersama, yakni ketepatan dan kemasalahatan bersama.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2023?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 MANFAAT PENELITIAN

- a. Memahami bagaimana pelaksanaan program bantuan langsung tunai didesa yang jauh dari perkotaan
- b. Mengetahui faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi proses pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- c. Mengetahui manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya program bantuan langsung tunai

1.3.2 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini untuk memahami bagaimana proses pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dilaksanakan oleh pemerintah desa karang agung, serta faktor yang mempengaruhi dan manfaat apa yang dirasakan masyarakat dari program bantuan yang dilaksanakan pemerintah tersebut.

1.4 LITERATUR REVIEW

Penelitian terkait dengan pelaksanaan program-program pemerintah secara umum tentunya sudah umum dilakukan guna mengukur tingkat keberhasilan dan kemanfaatan sebuah program. Penelitian ini mengkaji

pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah sebagai bentuk jaminan sosial bagi masyarakat, ada banyak artikel sejenis dan berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, yakni:

Artikel yang ditulis oleh Nor Arapah, yang membahas pengaruh bantuan program keluarga harapan (PKH) dan sembako kepada tingkat kesejahteraan masyarakat di kabupaten barito utara, penelitian ini menggunakan data sekunder dari BPS serta instansi terkait dan dianalisis dengan teknik regresi linier berganda. Dalam artikelnya dia menggambarkan bagaimana banyak kebijakan pemerintah yang telah diberlakukan selama ini untuk upaya pencegahan pandemi malah berdampak besar kepada masyarakat, hingga pada akhirnya mengalami kesulitan dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam bahasannya menyimpulkan bahwa bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah pusat dan daerah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten barito utara, karena dengan adanya bantuan tersebut penerima dapat meningkatkan penghasilan keluarganya dan mampu melewati batas kemiskinan, sehingga tidak memenuhi kriteria tingkat kemiskinan yang ditetapkan kementerian sosial dalam surat keputusan No. 146/HUK/ tahun 2013 (Arapah, 2020).

Artikel yang ditulis oleh Baso Iping, menggunakan metode deskriptif dan sumber datanya menggunakan data Pustaka, dengan judul *Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial*. artikel ini memandang program bantuan pemerintah dari sudut pandang ekonomi dan

sosialnya, dimana dapat di pahami bahwa penulis menyambut baik dengan adanya bantuan-bantuan yang telah sejak dahulu dijalankan dan saat ini yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terdampak pandemi, juga memandang bantuan yang diberikan dapat menjaga daya beli masyarakat. Dimana dapat dipahami bahwa daya beli yang terjaga ada pada masyarakat yang sejahtera (Iping, 2020).

Ratna Dewi dan Habib Furqony A menerbitkan sebuah artikel *jurnal* dengan judul *Analisis Pengaruh Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2005-2015*. Artikel ini membahas keterkaitan antara bantuan sosial tunai (BLT) dengan tingkat kemiskinan di Indonesia, dalam artikelnya penulis menemukan adanya penurunan tingkat kemiskinan yang positif dengan adanya BLT tersebut. Namun, penyaluran dan pencairan yang membingungkan kerap menjadi sumber masalah baru, selain itu mereka juga mengungkapkan bahwa pemberian BLT hanya dapat menahan tingkat daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat dan bukan menjadi solusi yang berkelanjutan (Dewi dan Andrianus, 2021).

Artikel dengan judul *Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dan Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa Tenggara*, ditulis oleh Helvine Gultom, dkk. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS dan di oleh menggunakan metode regresi berganda. Pada artikel ini menyatakan

bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPnT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh positif pada tingkat kemiskinan (Gultom et al., 2021).

Nuniek Dewi Pramanik menulis artikel dengan judul *Dampak Bantuan Paket Sembako Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid 19*. Pada artikel ini menggunakan metode kausal dengan menguji lebih dari satu variabel bebas, dan dalam bahasannya penulis menghitung keterkaitan bantuan sembako dan juga bantuan langsung tunai (BLT) dengan kelangsungan hidup masyarakat. Dimana menurut hasil kajian penulis membuktikan bahwa ada keterkaitan positif dari keduanya, sehingga penulis menyarankan seharusnya menambah jumlah penerima karena banyak yang kesulitan membiayai kehidupannya (Pramanik, 2020).

Ali Akbar Khomaini penulis artikel dengan judul *Dampak Program Bantuan Tunai (Cash Transfer) Terhadap Kesejahteraan Subjektif Di Indonesia*, dalam bahasannya penulis menggambarkan hubungan yang terjadi dan dampaknya dalam satu artikel, dimana dihasilkan kesimpulan bahwa bantuan langsung tunai hanya berdampak positif pada kepuasan keluarga, dimana mereka dapat menjaga tingkat konsumsi di tengah guncangan ekonomi. Namun, tidak terdapat efek yang signifikan pada indikator kesejahteraan subjektif lainnya yakni persepsi masa depan dan persepsi kesejahteraan anak-anak. Dimana bantuan yang di berikan bukanlah solusi jangka Panjang dan hanya bersifat sementara. Dalam tulisannya ali juga tidak sejalan dengan kebanyakan penulis yang menyatakan bahwa bantuan tunai

yang diberikan mempengaruhi tingkat kesejahteraan subjektif (Khomaini, 2020).

Muharir dan Reni H menulis artikel dengan judul *Pengaruh Bantuan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dan Blt Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Penerima Manfaat (Kpm) Di Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang*. dalam artikelnya mereka juga turut menyatakan paket bantuan yang diberikan pemerintah (PKH dan BLT) secara signifikan mempengaruhi tingkat kesejahteraan, dimana bantuan tersebut dapat memberikan jaminan biaya operasinal minimum dan mencegah tingkat kesejahteraan masyarakat miskin menurun (Muharir & Hariani, 2021).

Artikel yang ditulis oleh Nururrochmah H, dengan judul *Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Penerima Manfaat Dalam Kajian Program Keluarga Harapan: Tinjauan Empirik Dampak Kesejahteraan Dan Kualitas Hidup Penerima Manfaat*. Dalam artikelnya penulis berusaha untuk mengetahui kontribusi, dampak dan keterpenuhan yang diterima penerima melalui parameter 6T (tepat sasaran, tepat manfaat, tepat jumlah, tepat manfaat, tepat kualitas, tepat administrasi) serta menilai keberhasilan program PKH dalam mengubah pola konsumsi dan serta dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Dimana PKH yang merupakan salah satu program pengaman sosial dan perlindungan kepada keluarga miskin ini, dapat lebih fleksibel karena penerima dapat memilih untuk apa digunakan, apakah untuk konsumsi sehari-hari atau untuk kebutuhan non pangan seperti Pendidikan,dll (Hidayatulloh, 2020).

Skripsi yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Akibat Covid-19 (Studi Penelitian Di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo). Skripsi hasil karya Nur Azizah M ini menyampaikan hasil kesimpulan yang kurang lebih sama dengan kebanyakan yang lainnya, dimana dia menyatakan memang ada pengaruh yang baik pada tingkat kesejahteraan masyarakat penerima, walaupun hanya sementara namun dapat membantu menambah tingkat penghasilan diluar penghasilan utama mereka (Azizah Mayasari, 2020).

Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemi Covid 19 karya Anisa Mufida, dalam tulisannya anisa menggambarkan keruhnya berbagai kebijakan bantuan sosial pemerintah pada masa-masa awal pelaksanaannya. Dimana banyak kekisruhan yang terjadi, dari regulasi yang saling tumpangtindih, data base yang tidak sesuai dan banyak yang tidak tepat sasaran, dari tulisannya dapat dipahami banyak peluang untuk anggaran di korupsi(Mufida, 2020).

Artikel yang di tulis Carly E.F Maun berjudul Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan menggunakan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Dalam tulisan ini menggambarkan bagaimana proses yang di lakukan pemerintah desa Talaitad di kabupaten minahasa, dalam melaksanakan penyaluran 25%-30% bantuan sosial dari total dana desa (DD). Kurangnya

informasi penulis atas pelaksanaan program menimbulkan beberapa pertanyaan seperti apasaja kriteria penerima, proses pendataan dan apakah besaran bantuan tersebut dapat di potong oleh pemerintah desa. Dalam tulisan ini juga menjelaskan banyaknya peraturan, surat, dan edaran yang membawahi pelaksanaan program bansos dana desa, dalam tulisannya Carly menjelaskan melalui pendekatan sumber, pendekatan proses, dan pendekatan sasaran yang dilakukan oleh petugas desa talaitad telah dilakukan dengan sesuai dan tepat sasaran, sehingga menepis dugaan penyelewengan(Maun,2020).

Berbeda dengan Carly dalam artiel yang ditulis oleh Regi R.G dan Linda D yang berjudul Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Penanganan Dampak Covid – 19, dalam tulisannya berusaha mengevaluasi kebijakan BPNT menggunakan model yang di gunakan Leo Agustiano (2020) yang terdiri atas 5 kriteria yakni sumber daya aparatur, kelembagaan, sasaran, finansial, dan regulasi. Dalam temuannya masih ada kendala seperti data penerima yang belum diupdate dan masalah kurang paham akan indicator kemiskinan yang dimaksud oleh program tersebut(Garis dan Desfirani, 2021)

Senada dengan tulisan sebelumnya, jurnal yang di tulis oleh I Wayan Tagel Wirnarta dkk, dengan judul Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar. Pendekatan yang digunakan cendrung mirip meskipun indicator yang digunakan untuk penilaian sedikit berbeda. Dalam tulisannya Wayan dkk, menggunakan

pendekatan efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, dan ketepatan. Masih terdapat permasalahan yang sama dalam artikel ini, yakni masalah yang berkaitan dengan data penerima masih belum tepat (Winarta et al., 2020).

Kemudian diperjelas melalui artikel yang ditulis oleh Noni Noerkaisar dalam tulisannya yang berjudul Efektifitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 Di Indonesia. Dalam tulisannya dia menyatakan masih belum efektifnya penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah, penyaluran yang tidak merata, tidak tepat sasaran, penyelewengan, hingga pungutan liar marak terjadi saat itu. Dia berpendapat bahwa faktor utama yang menyebabkan semua masalah tersebut adalah tidak updatenya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), update DTKS sendiri menurutnya terakhir dilaksanakan pada tahun 2015, yang seharusnya paling lambat setiap 2 tahun (Noerkaisar, 2021).

Kebijakan dapat diartikan sebagai rangkaian usaha yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan, sekaligus sarana pemecahan masalah menggunakan sasaran dan waktu yang telah ditentukan (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Dalam tulisan yang sama dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan terdapat 3 tipe utama menurut model Helmut Wollman, yakni evaluasi tahap perencanaan (ex-ante), evaluasi tahap pelaksanaan (on-going), dan evaluasi pasca-pelaksanaan (ex-post). Dan hal-hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ialah disposisi, sumber data, komunikasi, dan struktur birokrasi (Desrinelti et al., 2021).

Tabel 1. 3 Tabel Jurnal

No.	Penulis	Judul	Jurnal	Link
1	Nor Arapah	Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Pkh Dan Sembako Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Ditengah Pandemic Covid 19 Di Kabupaten Barito Utara	Jurnal Ilmu Ekonomi (Manajemen Perusahaan) Dan Bisnis, Vol 4	https://jurnal.stiemuarateweh.ac.id/index.php/JIMB/article/view/58
2	Baso Iping	Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial	Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, Vol 1	https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/290
3	Ratna Dewi dan Habib Furqony Andrianus	Analisis Pengaruh Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2005-2015	Menara Ilmu, Vol 15	https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/2408
4	Helvine Gultom, Paulus Kindangen, George M. V. Kawung	Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dan Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa Tenggara	Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, Vol 21	https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/32812
5	Nuniek Dewi Pramanik	Dampak Bantuan Paket Sembako Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid 19	Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, Vol 1	https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/209
6	Ali Akbar Khomaini	Dampak Program Bantuan Tunai (<i>Cash Transfer</i>) Terhadap Kesejahteraan Subjektif Di Indonesia	Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, Vol 5	https://itrev.kemenukeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/161
7	Muharrir dan Reni Hariani	Pengaruh Bantuan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dan Blt Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Penerima Manfaat (Kpm) Di Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang	Integritas Jurnal Manajemen Profesional (IJMPRO), Vol 2	https://journal.fe-uigm.ac.id/index.php/IJMPRO/article/view/85

8	A Nururrochman Hidayatulloh	Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Penerima Manfaat Dalam Kajian Program Keluarga Harapan: Tinjauan Empirik Dampak Kesejahteraan Dan Kualitas Hidup Penerima Manfaat	Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol 43	http://ejournal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/2142
9	Nur Azizah Mayasari	Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (Blt-Dd) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Akibat Covid-19	Skripsi	http://eprints.umpo.ac.id/5960/
10	Carly Erfly Fernando Maun	Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan	Jurnal Politico, Vol 9	https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/30702
11	Anisa Mufida	Polemik Pemberian Bantuan Sosial DiTengah Pandemic Covid 19	ADALAH (Buletin Hukum & Keadilan), Vol 4	https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15669
12	Regi Refian Garis & Linda Desfirani	Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Penanganan Dampak Covid - 19	Musamus Journal of Public Administration, Vol 4	http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/fisip/article/view/3586
13	I Wayan Tagel Wirnartadkk,	Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar	Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, Vol 5	https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/1906
14	Noni Noerkaisar	Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia	Jurnal Manajemen Perbendaharaan, Vol 2	https://jmp.kemkeu.go.id/index.php/mapan/article/view/363
15	Abdullah Ramdhani & Muhammad Ali Ramdhani	Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik	Jurnal Publik, Vol 11	http://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/1/1

1.5 KERANGKA TEORI

Pada penelitian terdahulu perbandingan datanya ada sangat terbatas, karena memang pandemi merupakan kejadian yang sangat jarang terjadi. Pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan dan manfaat dari program bantuan pemerintah pada masa-masa kritis, serta sekaligus melakukan evaluasi dikala pemulihan ekonomi sedang diusahakan, juga tantangan ekonomi yang semakin berat. Untuk itu diperlukan adanya beberapa teori pendukung yang di butuhkan sebagai landasan pemahan penulis. Maka dari itu landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1.5.1 KEBIJAKAN PUBLIK

Iskandar dalam Ramdhani (2017) mendefinisikan kebijakan sebagai rangkaian aktifitas, aksi, rencana program, keputusan dan sikap untuk bertindak atau tidak yang dilakukan oleh para aktor untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi, dan penetapan sebuah kebijakan menjadi faktor penting yang harus dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam tulisan yang sama Wahyudi menjelaskan sebuah proses kebijakan menjadi input, proses, dan output.

- a. Input merupakan isu atau agenda pemerintah,
- b. proses merupakan tahap perumusan yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan atau elit organisasi dan bersifat politis,
- c. output dari sebuah proses kebijakan adalah implementasi dan kinerja kebijakan.

Sebuah kebijakan ditetapkan sekali dan dalam jangka waktu tertentu, bersifat mengikat, namun fleksibel. Oleh karena itu sebuah kebijakan tidaklah bersifat permanen(Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Dasar dari kebijakan publik berasal dari konsep kebijakan, teori dan proses kebijakan publik tidak hanya menekankan pada hal-hal yang dilakukan pemerintah tapi juga mencakup arah tindakan pemerintah. Kebijakan publik secara umum mencakup tahapan perumusan masalah, implementasi, dan evaluasi kebijakan(Dr. S. Anggara, 2014).

Kebijakan publik secara definisi yang dirumuskan W.I. Jenkins dalam sebuah buku yang berjudul Analisis Kebijakan yang di tulis oleh Wahab(2012):“serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang di ambil oleh actor politik atau kelompok actor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan para-actor dari para-actor tersebut”. Dalam buku yang sama Chief J. O. Udoji, mendefinisikan Kebijakan sebagai “suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat”.

Abdul Wahab (2012:20) dalam bukunya membagi kedalam beberapa bagian terkait dengan karakteristik kebijakan publik:

- a. kebijakan publik adalah tindakan yang sengaja dan terarah para suatu tujuan tertentu

- b. kebijakan publik hakikatnya adalah segala tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola, untuk mencapai tujuan perorangan ataupun kelompok pejabat pemerintah
- c. kebijakan publik merupakan apa yang dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu
- d. Kebijakan publik dapat berarti positif, yakni ketika kebijakan dimaksudkan guna menyelesaikan masalah tertentu, namun dapat berarti negatif, yakni ketika pejabat/pemerintah memilih diam tanpa tindakan.

Dari beberapa pandangan diatas maka dapat dipahami bahawa kebijakan publik merupakan sebuah tindakan, atau cara yang disusun oleh pemegang kuasa untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Kebijakan publik bersifat mengikat bagi mayoritas masyarakat sekaligus fleksibel, kinerja kebijakan juga dapat dinilai dan dievaluasi untuk mengetahui bagaimana efek yang ditimbulkan oleh kebijakan yang akan/sedang/telah dilaksanakan.

1.5.2 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Implementasi secara umum dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan individu/pejabat atau kelompok pemerintah dan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan seperti yang tercantum dalam keputusan kebijakan yang telah disusun sebelumnya(Wahab, 2012). Mazmania dalam Widodo (2010:87) berpendapat bahwa implementasi pada hakikatnya ialah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program berlaku

atau dirumuskan, pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan dampak yang timbul pada masyarakat.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa studi implementasi merupakan sebuah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana dengan harapan akan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan yang dirumuskan.

Studi tentang Implementasi bukanlah sesuatu yang baru, studi ini telah dilakkan sejak tahun 1970-an dimulai dengan terbitnya tulisan yang berjudul *Implementation* oleh Jeffrey Pressman dan Aron Wildavsky (1973) dan juga Erwin Hargrove (1975) dengan buku yang berjudul *The Missing Link: The Study of Implementation of Social Policy*. Maka dari itu, studi ini telah tumbuh dengan berbagai pendekatan yang sangat beragam tergantung pada factor-faktor yang mempengaruhinya. Anggara (2014) menyampaikan ada 2 hal yang dapat membuat perbedaan pendekatan dalam teori implementasi, yaitu isu atau jenis kebijakan yang beragam, dan konteks kelembagaan yang juga beragam.

- a. isu atau jenis kebijakan yang beragam; isu atau jenis kebijakan yang berdeda mumbutuhkan pendekatan yang berberbeda pula, karna ada kebijakan yang sejak awal sudah diformulasikan dengan rumit dan kompleks serta melibatkan banyak orang, namun ada pula yang relatif lebih mudah. Dalam konteks yang sama ruang lingkup kebijakan juga memiliki tingkat kesulitan dan pendekatan yang berbeda pula.

- b. konteks kelembagaan yang berbeda; dalam konteks kelembagaan berkaitan dengan system politik dan kelembagaan dalam sistem negara, program atau kebijakan yang sama dapat dilaksanakan dengan cara yang berbeda disetiap negara tergantung pada system politik dan system administrasi negara yang bersangkutan.

Implementasi kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan akan diukur tingkat kinerja dan efektivitasnya melalui skema atau model evaluasi, dari hasil evaluasi dapat mengetahui dan menentukan sifat yang ditimbulkan, baik secara positif karna diterima dengan baik, maupaun negatif karna tidak mendapat dukungan lebih lanjut. Dalam pelaksanaan evelauasi kebijakan Desrinelti dkk (2021) menyatakan bahwa evaluasi dapat dilakukan pada setiap tahapan yang ada pada pelaksanaan kebijakan, yakni pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pasca pelaksanaan. Yang kemudian dari pelaksanaan evaluasi ketiga tahapan tersebut dapat tim penilai dapat mengetahui keberhasilan kebijakan/program secara keseluruhan.

Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa inggris *evaluation*, yang dalam Bahasa Indonesia berarti penilaian, yang kemudian evaluasi menunjuk pada aktifitas atau tindakan yang dilakukan untuk menentukan nilai dari sesuatu. Akib (2020) dalam tulisannya menggambarkan evaluasi sebagai aktivitas untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menyajikan informasi terkait dengan objek yang divalusi, dengan cara menilai dan membandingkan indikator sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan itulah.

Lebih lanjut Carol H. Weiss dalam buku yang ditulis oleh Sahya Anggara (2014:274) mengatakan tujuan dari sebuah evaluasi kebijakan adalah *“untuk mengukur efek suatu program terhadap tujuan yang ditetapkan ingin dicapai juga sebagai sarana kontribusi kepada keputusan selanjutnya pada peningkatan program dimasa depan. Efeknya ialah menekankan pada hasil efisiensi program, kejujuran, moral ataupun tingkat kepatuhan pada standar atau aturan, menggunakan kriteria eksplisit untuk menilai seberapa baik program berjalan”*.

Secara umum kegiatan evaluasi merupakan bagian penting dalam proses implementasi kebijakan, karna secara fungsi evaluasi dibutuhkan dalam memenuhi esensi dari akuntabilitas. Menurut William N. Dunn fungsi evaluasi ialah:

1. Memberikan penjelasan yang relevan atas realitas pelaksanaan program
2. Mengukur kepatuhan, yakni melihat kesesuaian atas standar dan prosedur yang berlaku
3. Auditing, dengan melihat keluaran dan mengawasi kebocoran, penyimpangan dan mencegah adanya penyelewengan
4. Akunting, sebagai pengukur dan melihat dampak sosial dari sebuah program.

Selain memiliki fungsi, evaluasi sebenarnya memiliki tujuannya sendiri, Subarsono dalam Winarta et al. (2020) menyebutkan tujuan dari evaluasi yakni:

1. Menentukan tingkat kinerja sebuah kebijakan
2. Mengukur tingkat efisiensi kebijakan
3. Mengukur keluaran/output kebijakan
4. Mengukur dampak suatu kebijakan
5. Sebagai bahan input pada kebijakan dimasa mendatang
6. Sebagai tindakan pengawasan mencegah penyelewengan

William N. Dunn dalam sahya Anggara (2014:279) menyatakan ada beberapa aspek yang harus masuk dalam penilaian saat melaksanakan evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, dan ketepatan:

a. Efektivitas

Eektivitas berasal dari kata dasar Efektif dapat diartikan sebagai akibat, pengaruh, kesan, manjur atau mujarap. Dalam konteks ini diartikan sebagai hasil sebuah kebijakan, dan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai sesuai dengan hasil yang telah ditetapkan. Menurut Gibson at.al 1996, dalam (Nisa & Setiawati, 2022) Efektivitas merupakan penialain yang dibuat atas prestasi individu, kelompok, atau organisasi dalam mencapai standar yang direncanakan, semakin dekat dengan standar semakin sefektif. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai alat ukur keberhasilan capaian atau tujuan yang ditetapkan(Putri, 2019).

b. Efisiensi

Efisiensi dalam Kamus besar baha Indonesia (KBBI) memiliki arti dasar sebagai ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu, hal ini berkaitan dengan Sumber daya (biaya,tenaga,dll) yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Sedarmayanti, 2017, hal.112 dalam Patentius (2022) Efisiensi meruoakan daya guna yang menekankan tidak hanya pada hasil, tapi juga pada usaha dan daya untuk mencapai keberhasinal dengan upaya paling optimal.

c. Kecukupan

Kecukupan atau cukup berkaitan dengan memenuhi kebutuhan, memenuhi keperluan, atau tidak kurang, dalam konteks ini sejauh mana capaian yang diinginkan.

d. Pemerataan

Pemerataan dalam konteks ini memiliki artian cara atau perbuatan meratakan, ini berkaitan dengan jumlah penerima manfaat. Chapra,2000 dalam tulisan yang publish oleh Juliana et al., (2018) pemerataan iala ketika distribusi kebutuhan berhasil dipenuhi secara merata tanpa menimbulkan kegaduhan.

e. Responsivitas

Respossivitas atau daya tanggap menurut Widodo(2001) adalah sikap dasar yang harus dimiliki dalam proses umplementasi, daya tanggap yang dimaksud ialah terhadap masalah, keluhan, kebutuhan, dan aspirasi Masyarakat (Nurani et al., 2015) dalam hal ini juga berkaitan

dengan sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program yang sedang dijalankan.

f. Ketepatan

Ketepatan, ketelitian atau tepat berkaitan dengan hasil yang diinginkan apakah sudah tepat pada sasaran yang diinginkan atau ditetapkan sebelumnya.

Hasil yang diharapkan dari sebuah evaluasi kebijakan pemerintah adalah menilai keberhasilan sebuah kebijakan juga program yang diterbitkan pemerintah. Selain itu, dengan adanya evaluasi kita juga dapat menilai dampak dari sebuah program, baik dampak secara individu maupun instansi juga dapat mengetahui dampak yang tidak diperkirakan baik dalam konteks positif maupun negatif, secara umum dampak dapat dibagi dalam 4 tipe utama, yakni dampak pada perekonomian (penghasilan, nilai tambah, dll), proses pembuatan kebijakan, pada sikap publik (dukungan pada pemerintah, program, dan sebagainya), dampak kualitas hidup (nonekonomis) (Sahya Anggara, 2014).

1.5.3 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)

Bantuan Langsung Tunai disingkat BLT merupakan upaya pemerintah dalam menaggulangi kemiskinan, dalam prosesnya BLT merupakan aktivitas pemberian uang secara tunai kepada masyarakat miskin dan tidak mampu dimasa pandemi, yang dananya bersumber dari alokasi dana desa pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri keuangan No.40/Pmk.07/2020 tentang perubahan atas Pmk 205/pmk.07/2019 tentang

pengelolaan dana desa (Muharir & Hariani, 2021). Izzati dalam Dewi & Andrianus (2021) Program BLT merupakan bantuan yang di berikan pemerintah secara tunai kepada masyarakat miskin guna membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Wynandin Imawan dalam Maun (2020) juga menyatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai merupakan satu dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang secara umum dibagi dalam 3 klaster. Program BLT masuk kedalam klaster I seperti halnya program Raskin, PKH, JamKesMas dan Bea siswa Pendidikan. Dalam Klaster II seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mulai dari PNPM Pedesaan, PNPM Perkotaan, PNPM Kelautan, Dll. Dan pada klaster III terdapat program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil (UMK), termasuk juga UMKM dan program KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Pelaksanaan program BLT pertama kali dilaksanakan pemerintah pada tahun 2005, yang awalnya dilakukan untuk mengkompensasi kenaikan harga BBM yang di atur dalam Intruksi Presiden No.12 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin (Azizah Mayasari, 2020:12). Saat ini program BLT yang dilakukan dimasa pandemi memiliki tujuan yang berbeda, yakni untuk membantu masyarakat penerima manfaat tetap dapat memenuhi kebutuhannya, mencegah turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, dan meningkatkan tanggung jawab sosial Bersama.

Pada tahun 2022 Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) melaksanakan peraturan baru yang ditetapkan pemerintah, alokasi BLT DD tahun 2022 mengalami kenaikan. Berdasarkan Perpres Nomor 104 Tahun 2021 pasal 5(4) yang mengatur kenaikan alokasi anggaran program perlindungan sosial dari pada tahun-tahun sebelumnya, alokasi dana desa yang di berikan untuk BLT-DD sekitar 25-35% menjadi minimal 40% dari alokasi Dana Desa (www.kemendes.go.id,2021). Yang dikuatkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/ PMK.07/2021 perubahan Permenkeu No. 17/ PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan Dampaknya, yang di atur pada pasal 20 ayat 4. Menerangkan bahwa pengurangan 40% pada pagu anggaran ke 1 dan ke 2 digunakan untuk BLT, sedangkan pada pagu anggaran ke 3 dikurangi besaran untuk alokasi BLT menjadi hanya 20%.

Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga telah melalui proses yang cukup panjang, dihimpun dari paparan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2021 (*Badan Pusat Statistik, 2022*). Penyaluran BLT berbarengan dengan proses pencairan Dana Desa yang dibagi dalam 3 tahapan, dengan 40% pagu anggaran Dana Desa pada tahap 1 (periode bulan 1 s.d 5) dan 2 (periode bulan 6 s.d 10) adalah BLT, sedangkan pada tahap 3 (periode bulan 11 s.d 12) senilai 20% nilai BLT dari pagu anggaran. Penganggaran BLT

merupakan prioritas yang harus dilaksanakan selama tahun 2021 s.d 2022, yang dilaksanakan dengan kepala desa menetapkan peraturan terkait dengan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan kriteria paling sedikit memenuhi syarat keluarga miskin dan tidak mampu serta tidak termasuk kedalam program jarring sosial lain seperti PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, dll. Alur pelaksanaan implementasi sebagai berikut:

- 1) Jumlah KPM yang direkam dan ditetapkan pada bulan ke-1, data berasal:
 - a. Jumlah KPM yang menerima BLT bulan ke-1 tahun sebelumnya, atau
 - b. Hasil pendataan jumlah KPM yang akan menerima BLT pada tahun 2021
- 2) Penyaluran BLT Desa setiap bulan Secara Pro-rata (dibuktikan dengan rekam realisasi)
- 3) Apabila penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan 1 tidak dilaksanakan pada bulan januari, penyaluran BLT bulan ke 1 sampai bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi pembayaran bulan sebelumnya.

Dalam sebuah laporan BPS pada bulan juli 2022 tentang Berita Resmi Statistik, dapat diketahui bahwa batas garis kemiskinan Di Indonesia pada bulan Maret 2022, secara nasional yang pendapatan per kapitanya adalah Rp505.469 /bulan. Sedangkan dalam lapoaran Berita Statistik Provinsi Kalimantan Utara pada juli 2022, garis kemiskinan Kaltara adalah

Rp772.914 /bulan per kapita. Masyarakat miskin dapat diketahui dari 14 kriteria standar kemiskinan yang ditetapkan BPS, dan jika 9 variabel terpenuhi maka digolongkan sebagai rumahtangga miskin (*[Indikator Kemiskinan] - Aplikasi Database Kesra Provinsi Kalimantan Utara, 2017.*), kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah / bambu / kayu murah
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplester
4. Tidak memiliki fasilitas bung air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai / air hujan
7. Bahan bakar untuk masak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam dalam satu kali seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh

perkebunan. Dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah
Rp 600.000 -per bulan

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah / tidak tamat
SD / tamat SD

14. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal
Rp 500.000, seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, ternak,
kapal motor, atau barang modal lainnya.

1.6 DEFINISI KONSEPTUAL DAN DEFINISI OPRASIONAL

1.6.1 DEFINISI KONSEPTUAL

Definisi konseptual merupakan gambaran umum penulis tentang materi penulisan, sehingga dalam tulisan ini definisi konseptual sebagai berikut:

a. Kebijakan Publik

Kebijakan publik atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan adalah tindakan yang terstruktur dan terencana yang di tetapkan oleh actor pemegang kekuasaan guna menyelesaikan masalah yang terjadi.

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas mengimplementasi/ menerapkan kebijakan yang telah dirancang dan disahkan oleh pejabat, yang dalam rangkaiannya juga mengevaluasi dampak program yang telah atau sedang dilaksanakan, baik dalam sifat yang positif maupun negatif.

c. Bantuan Langsung Tunai

Bantuan langsung tunai adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan, yang dilakukan dengan menyalurkan bantuan uang tunai kepada keluarga sasaran, yang anggarannya berasal dari dana desa.

1.6.2 DEFINISI OPERASIONAL

Definisi konseptual dapat diartikan sebagai kumpulan intruksi dan variable yang digunakan untuk mendefinisikan secara konseptual. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), dengan maksud tersebut peneliti perlu menghimpun korelasi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakatnya, membandingkan proses pelaksanaan dari sisi pemerintah dan cerita dari keluarga penerima manfaat juga tokoh lain yang turut mengawal program tersebut. Variable yang digunakan pada tulisan ini untuk membantu peneliti mengetahui beberapa materi yang ingin diteliti menggunakan indikator yang dipopulerkan oleh William N Dunn, yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas secara harfiah berasal dari kata efektif yang memiliki artian memiliki efek atau hasil guna, yang dalam konteks ini diartikan sebagai hasil dari sebuah kebijakan, apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.

2. Efisiensi

Efisiensi ialah besaran upaya yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, berkaitan juga sumber daya (sumber daya manusia dan biaya) yang dibutuhkan dalam melaksanakan program.

3. Kecukupan

Kecukupan berkaitan dengan target capaian yang ditetapkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan menyelesaikan masalah.

4. Pemeratan

Pemerataan ialah bagaimana proses distribusi yang telah dilakukan, apakah telah disalurkan secara merata kepada keluarga yang membutuhkan.

5. Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan apakah kebijakan atau program yang dijalankan dapat memenuhi kebutuhan atau preferensi masyarakat penerima manfaat.

6. Ketepatan

Ketepatan berkaitan dengan apakah hasil kebijakan/ program yang dilaksanakan bermanfaat bagi penerima.

Variabel	Indikator
Efektifitas	Apakah hasil yang diharapkan dari program BLT telah tercapai?
Efisiensi	Apa saja usaha (biaya) yang dikeluarkan pemerintah desa dalam pelaksanaan program BLT tersebut?
Kecukupan	Berapa target capaian yang diinginkan pemerintah desa untuk memecahkan masalah (jumlah keluarga miskin yang dijangkau BLT)?
Pemerataan	Apakah pelaksanaan program tersebut sudah merata pada keluarga yang membutuhkan?
Responsifitas	Apakah program BLT yang dilaksanakan sudah memuaskan kebutuhan masyarakat? (berkaitan dengan apakah masyarakat mendukung program tersebut atau mengharapkn kebijakan lain yang lebih tepat?)

Ketepatan	Apakah hasil yang diinginkan bermanfaat atau bernilai dimata masyarakat?
-----------	--

Tabel 1. 4 Variabel dan Indikator model William N. Dunn (1999:609)

1.7 METODELOGI PENELITIAN

1.7.1 JENIS PENELITIAN

Dalam proses penelitian peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian kualitatif berusaha menemukan dan menggambarkan secara deskriptif kegiatan dan dampak dari sebuah tindakan yang sedang dilakukan (Setiawan, 2018). yakni dengan melakukan analisis kepada data-data yang didapatkan di lapangan. Pendekatan ini juga lebih menekankan pada proses deskripsi dan analisis secara mendalam dengan berdasarkan pada data yang ada secara teliti. Sehingga sesuai dengan deskripsi Frankel (1998;379-402) yang menyampaikan bahwa penelitian kualitatif memiliki karakteristik:

- a. data primer yang di ambil dari lapangan menjadi instrumen kunci pada penelitian ini,
- b. dikumpulkan melalui kata dan gambar
- c. memperhatikan proses dan bentuk produk,
- d. dilakukan dengan menganalisis data,
- e. dan fokus bagaimana agar sebuah masalah mudah dipahami.

1.7.2 WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN

Proses pengambilan data wawancara lapangan penelitian ini dilakukan pada Tanggal 10-20 Desember tahun 2023, lokasi pengambilan data ialah Di Desa Karang agung, Kabupaten Tanjung Palas Utara, Provinsi Kalimantan Utara. Lokasi ini dipilih karna lokasi yang strategis, lokasi desa yang tidak dekat dengan dengan kota kabupaten, cenderung dekat dengan perbatasan Kabupaten Tana Tidung, tetapi termasuk desa maju dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Dengan karakteristik tersebut peneliti memiliki persepsi bahwa desa tersebut dapat menjadi representasi pelaksanaan program Bantuan langsung Tunai secara umum di Daerah Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara.

1.7.3 DATA DAN SUMBER DATA

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung pada saat proses pengambilan data, dapat berupa hasil wawancara lapangan dengan narasumber, responden atau informan yang relevan terkait dengan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode random sampling dalam pengambilan sampel penerima BLT-DD tahun 2023, yang pada tahun tersebut terdapat 27 penerima manfaat. Dan peneliti berhasil mewawancarai 8 dari total

penerima di tahun tersebut, mengenai indikator yang di bahas, sebagai data pembanding dari 3 orang yang penulis wawancarai dari pihak desa.

Pihak pemerintah desa yang diwawancarai:

1. Bpk Yosua,S.IP (Sekretaris Desa Karang Agung)
2. Ibu Dewi Setianingsih, S.P (Kasi bidang Pelayanan)
3. Bpk Eman Mustika (Ketua BPD Desa Karang Agung)

Masyarakat penerima manfaat yang diwawancarai:

1. Ibu Ida Hikmah
2. Ibu Juma'I
3. Ibu Eva Muji Astuti
4. Ibu Komala (Istri Bapak Ecen Kasman)
5. Ibu Sunyanah (Istri Bapak Sueminto)
6. Bapak Kusmanto
7. Bapak Tasean
8. Ibu Marsum

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah diolah oleh pihak lain untuk merepresentasikan hasil yang didapat, data ini dapat digunakan sebagai pembanding dalam proses penelitian ini. Data tersebut dapat berupa artikel jurnal, arsip-arsip, buku, dokumentasi dan lain-lain. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah penelitian sebelumnya melalui jurnal yang dikutip, juga dokumen dokumen pendukung yang berkaitan dengan penulisan ini.

Dalam perjalanan penulisan karya ini, penulis mengumpulkan data dokumen seperti Salinan Surat Keputusan kepala desa dan lampiran, mengenai hasil penetapan daftar nama keluarga penerima manfaat tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023. Serta laporan realisasi anggaran dana desa tahun 2021, 2022, dan 2023, kepada pemerintah desa.

1.7.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

a. Wawancara

Metode pengumpulan data melalui wawancara menurut Chesley(Tanujaya,2017) merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur ataupun tidak, guna mendapatkan informasi mengenai objek yang diteliti. Dalam melakukan pengambilan sampel data primer wawancara pada subyek baik pelaksana kebijakan ataupun penerima manfaat akan dilakukan secara acak pada data yang tersedia. dalam penelitian ini setiap kelipatan 10 dari angka 1 dari data penerima manfaat akan menjadi sampel dalam penelitian ini.

b. Kajian Pustaka dan media masa

Memanfaatkan media yang telah ditulis seperti arsip data, sosial media, web artikel, artikel jurnal, ataupun media berita, akan menjadi data sekunder dari penelitian ini.

c. Dokumentasi

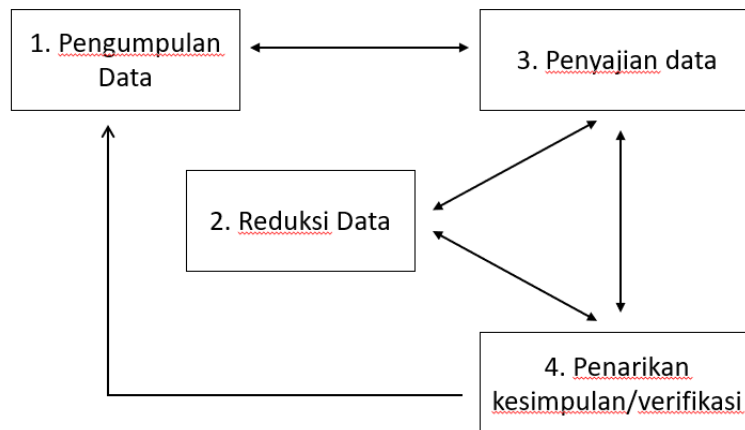
Dokumentasi berupa gambar dijadikan sebagai bukti dalam pelaksanaan penelitian guna melengkapi serta sebagai validasi kebenaran penelitian ini.

1.7.5 TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data ialah proses menggabungkan data yang dikumpulkan melalui proses wawancara, kajian pustaka, serta dokumentasi kemudian menganalisis dan memproses data yang diperoleh untuk kemudian dijabarkan berdasarkan dengan kategori yang ada, lalu disimpulkan dan disajikan menjadi pembahasan yang menarik dan mudah dipahami. Muhadjir dalam sebuah tulisan mengartikan analisis data sebagai upaya yang dilakukan guna mencari dan menata dengan sistematis setiap catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti pada kasus yang diteliti, menyajikannya sebagai temuan pada orang lain kemudian untuk meningkatkan pemahaman pada masalah maka perlu dilanjutkan dengan mencari makna (Rijali, 2019). Pendapat lain menyatakan analisis data ialah berkerja dengan data, mengordinasikan, memilah data menjadi satuan, mensistematiskan data, menemukan yang penting dan dapat di pelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan pada orang lain, sebagaimana disampaikan Bogdan dan Bikler dalam Wandt et al (2013).

Dari hasil gambaran diatas maka penelitian ini menggunakan Teknik analisis data interaktif yang di populerkan Miles dan Huberman (1992:90). Komponen teknik analisis dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Komponen Analisis Data interaktif



Gambar 1.1 Sumber: Miles dan Huberman dalam Wandu et al (2013)

a. Reduksi data

Reduksi data ialah proses penyederhanaan materi, abstraksi dan transformasi hasil data kasar yang diperoleh dari lapangan. Prosesnya terus berlangsung sejak awal penulisan hingga akhir penetapan kesimpulan. Kegiatan meringkas kumpulan data dan memasukkannya sesuai dengan konsep, kategori dan tema-temanya secara tepat adalah yang dimaksud reduksi data.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan hasil dari reduksi data, dimana penyajian data adalah ketika data/informasi yang telah disusun guna mempermudah proses analisis dan penarikan sebuah kesimpulan. Bentuk penyajian data dapat berupa teks naratif, catatan lapangan, bagan, grafik, dll.

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam model ini, peneliti sudah berusaha mencari kesimpulan sejak awal penelitian. Kesimpulan awal yang disediakan mula-mula belum jelas, yang kemudian setelah melalui tahapan sebelumnya kesimpulan yang sebenarnya kan menjadi semakin jelas, semakin rinci dan mengakar dengan kuat. Bisa diartikan jika tahap penarikan kesimpulan adalah tahapan yang mampu menjawab rumusan masalah peneliti.